

POLITICAL WILL PEMILIH FIGUR KEPEMIMPINAN CALON KEPALA DESA

Rohmat

IAIN Surakarta

Email: r_ohmat@yahoo.com

Abstract

The study aims to know political will of the voters the leadership figure of the village chief candidate in rural community development in the Sanggung village, Gatak District, Sukoharjo, 2012. This study used a descriptive approach. The population in this study is 1500 suffrage and sample is 100 suffrage. The instruments to collect data using questionnaires. The data analysis using the percentage (percentile). The results of this study found that political will of the voters the leadership figure of the village chief candidate in doing the task of rural community development, that is: the initiatives (98%); the priority (82%); oriented mobilization of community development (50%); emphasizing the rule of law in the form of severe punishment for corruption (40%); business sustainability minded (99%); attention by giving passion and spirit new life and eliminate the monotony of village life (97%); influential in improving the socio-economic welfare (100%); improving education (84%); undertake modernization in the field of transport and technology (100%); did not contest the figure gender prospective village chief (69%) and the changes (94%).

مستخلص

والغرض من هذه الدراسة لتحديد الإرادة السياسية للقيادة المرشحين الناخبين شخصية من رؤساء القرى في تنمية المجتمع الريفي في قرية Sanggung، Gatak، سوكوهارجو، 2012. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي. بلغ عدد السكان في 100-1500 عينات من حقوق التصويت والحق في التصويت. أدوات جمع البيانات باستخدام الاستبيانات. تحليل البيانات باستخدام النسبة المئوية (المئوية). العثور على نتائج هذه الدراسة أن الإرادة السياسية للشخصية الناخبين في قيادة رأس المرشحين قرية تنفيذ مهام للتنمية الريفية، وهي مبادئ

(98%)، فإن الأولوية (82%)، وتعبئة موجهة نحو تنمية المجتمع (50%): التركيز على إنفاذ القانون شكل حاد من أشكال العقاب للمجرمين (40%): الشركات الاستدامة في التفكير (99%): الاهتمام بإعطاء العاطفة جديدة وحب للحياة، والقضاء على الرتبة من حياة القرية (97%): تأثيرا في تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي (100%)، وزيادة التعليم (84%)، وإجراء التحديث في مجال النقل والتكنولوجيا (100%): الأرقام بين الجنسين لا تشكل في الرأس المحتملين من القرية (69%) وتغير (94%).

Keywords: *Political will*, leadership of village chief, community development.

A. Pendahuluan

Dalam pembangunan bangsa, mempertimbangkan diantaranya: landasan ideal bangsa; pijakan konstitusi negara; kebinekatunggalikaan; dasar operasional dan *political will*. *Political will* ini akan memberi corak dalam pembangunan masyarakat, termasuk pembangunan masyarakat pedesaan. Moeljarto Tjokrowinoto (1977) menyatakan bahwa, pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan spiritual.¹

Selanjutnya, Khairuddin (1992) mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat desa sebagai bagian dari pembangunan nasional, tentu saja mempunyai tujuan-tujuan yang tidak terlepas dari pembangunan secara keseluruhan. Karena kondisi pedesaan mempunyai spesifikasi tertentu, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, maka tujuan pembangunan masyarakat di pedesaan lebih sering ditekankan pada bidang ekonomi, sebab kondisi ekonomi inilah yang pada umumnya sangat memperhatikan. Oleh karena itu pembangunan pedesaan diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.²

Demikian halnya pembangunan pedesaan di Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah diharapkan dapat

¹ Moeljarto Tjokrowinoto, Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan Administrasi di dalam Pembangunan Masyarakat Desa, dalam Buletin Balai Pembinaan Administrasi, Universitas Gadjah Mada, No.3/1977.

² Khairuddin, Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta, Liberty, 1992)

menggerakkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk itu, masyarakat desa tersebut memperhitungkan kepada figure kepemimpinan calon kepala desa yang akan memimpin sebagai kepala desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka masyarakat sebagai pemilih figur calon kepala desa mengedepankan pemimpin yang terus menerus memiliki *good will be*. Kenyataannya, kepala desa dimaksud sebelumnya terlibat persoalan hukum, bahkan pernah menjadi urusan pengadilan. Selain itu, kepala desa sebelumnya juga terkesan memiliki problem mengarah kepada persoalan hukum sampai meninggal dunia sebelum masa jabatan habis.

Figur kepala desa, desa dimaksud selama ini bukan gender. Hal ini, dimungkinkan probabilitasnya yang memenuhi persyaratan termasuk diterima oleh pemilih figur bukan gender sekalipun belum menjadi jaminan sebagai kepala desa dapat memimpin masyarakat pedesaan yang maju, sejahtera dan damai. Dekade ini, pembangunan pedesaan yang juga sering disebut *community development* memberikan peluang besar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Begitu pula masyarakat pedesaan desa Sanggung, nampak mengalami pergeseran yang peduli untuk pembangunan desanya, sehingga kepala desa yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu, masyarakat yang akan memilih figur calon kepala desa menegaskan untuk bisa membawa kepada perubahan yang memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa, sehingga warga desa tidak merasa jenuh dengan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, masyarakat akan meningkat kesejahteraan sosial ekonomi maupun pendidikannya. Oleh karena itu, masyarakat pemilih figur calon kepala desa membuka peluang kepada calon yang mempunyai kemampuan seperti yang diharapkan oleh masyarakat pemilihnya. Sehubungan dengan uraian hal tersebut di atas, maka diperlukan informasi dengan melakukan penelitian. Maka dari itu, penulis mengkaji melalui penelitian dengan judul "*Political will* Pemilih, Figur Kepemimpinan Calon Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan di Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012".

B. Kajian Teori

B.1. *Political will*

1. Pengertian *Political will*

Craig Charney (2009) menyatakan bahwa, to advocates, politicians, and organizations promoting change, “*political will*” is the holy grail. When advocates argue, politicians vote, and organizations campaign, they say they are trying to shape or respond to *political will*. *Political will* is the ghost in the machine of politics, the motive force that generates political action.³ Selanjutnya, Nadyafirdhani (2012) mengemukakan bahwa *political will* merupakan sebuah kemauan suatu negara yang dalam perwujudannya dibutuhkan dukungan dari rakyatnya.⁴

2. Indikator *political will*

Derick (1999) mengemukakan beberapa indikator yang bisa dipergunakan untuk mengukur *political will* pemerintah, yaitu:⁵

- a. Inisiatif. Dari mana sebetulnya inisiatif pemberantasan korupsi? Apakah pemerintah memiliki inisiatif untuk memberantas korupsi?
- b. Prioritas. Apakah pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan menentukan sektor mana yang akan menjadi prioritas utama yang menjadi target pemberantasan korupsi? Pemilihan prioritas sangat penting karena korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik dan meluas di berbagai sektor.
- c. Mobilisasi dukungan politik. Ada tidaknya kemauan politik juga tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menggalang dukungan bagi program anti korupsi. Program anti korupsi yang dijalankan pemerintah harus mendapat dukungan dari kekuatan politik

³ Craig Charney, *Political Will: What is it? How is it Measured?*, (New York: Charney Research, 2009)

⁴ Nadyafirdhani, “ *National Power*” dikutip dari http://nadyafirdhani-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-61768-Umum-Nasional%20Power.html

⁵ Derick W. Brinkerhoff, *State-Civil Society Networks For Policy Implementation In Developing Countries* dalam *Review of Policy Research*, Volume 16, Issue 1, pages 123–147, March 1999.

lain. Kalau tidak ada dukungan, riwayat pemerintah akan singkat karena keburu digantikan pemerintah baru. Tanpa dukungan politik juga bisa menjadikan pemberantasan korupsi macet karena pemerintah mesti berkompromi dengan kekuatan politik lain.

- d. Penegakan hukum berupa hukuman yang berat bagi koruptor. Tanpa sanksi yang berat, orang tidak akan jera melakukan korupsi. Korupsi pada dasarnya memiliki benefit atau keuntungan tinggi. Nah, kalau cost atau konsekuensinya tinggi, seperti sanksi hukuman, orang akan takut. Tetapi kalau tidak ada atau cost rendah, orang akan berani melakukan korupsi.
- e. Keberlanjutan usaha. Apakah program pemberantasan korupsi merupakan usaha yang diikhtiarkan terus menerus? Ataukah hanya untuk kepentingan sesaat, misalnya menjelang Pemilu.

B.2. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah *the process of directing and influencing the task related activities of group members*. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan.⁶ Selain itu, Jacob&Jacques (1990) mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.⁷

Selanjutnya, Mochammad Teguh (2001) menyatakan bahwa kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan, artinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara seperti menggunakan otoritas yang

⁶ Stoner, Freeman, dan Gilbert, *Management*, (US, Prentice Hall, 1995)

⁷ Jacobs, T. O., and E. Jaques, *Measures of Leadership*, (NJ: Leadership Library of America, Inc, 1990)

terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengkomunikasikan sebuah visi. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat dipandang efektif apabila dapat membujuk para pengikutnya untuk meninggalkan kepentingan pribadi mereka demi keberhasilan organisasi.⁸

2. Fungsi Kepemimpinan

Dedi (2012) mengemukakan beberapa fungsi dalam kepemimpinan, yaitu:⁹

a. Pemimpin sebagai eksekutif (*Executive Leader*)

Sering kali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan, dia memimpin dan mengawasi tindakan orang-orang yang menjadi bawahannya. Dan membuat keputusan-keputusan yang kemudian memerintahkannya untuk dilaksanakan. Kepemimpinan ini banyak ditemukan didalam masyarakat dan biasanya bersifat pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah memerlukan fungsi tersebut.

b. Pemimpin sebagai penengah

Dalam masyarakat modern, tanggung jawab keadilan terletak di tangan pemimpin dengan keahliannya yang khas dan ditunjuk secara khusus. Ini dikenal dengan pengadilan. Dan bidang lainnya, umpamanya dalam bidang olahraga, terdapat wasit yang mempunyai tugas sebagai wasit.

c. Pemimpin sebagai penganjur

Sebagai propagandis, sebagai juru bicara, atau sebagai pengarah opini merupakan orang-orang penting dalam masyarakat. Mereka bergerak dalam bidang komunikasi dan publistik yang menguasai ilmu komunikasi. Penganjur adalah sejenis pemimpin yang memberi inspirasi kepada orang lain. Seringkali ia merupakan orang yang pandai bergaul dan fasih berbicara.

⁸ Mochammad Teguh, Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Dasar (I.KIDI), (Yogyakarta, UII Press, 2001)

⁹ Dedi "Kepemimpinan" dikutip dari <http://blog.binadarma.ac.id/dedi1968/wpcontent/uploads/2012/09/kepemimpinan.pdf>

d. Pemimpin sebagai ahli

Pemimpin sebagai ahli dapat dianalogikan sebagai instruktur atau seorang juru penerang, berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit sosial dimana dia bekerja. Kepemimpinannya hanya berdasarkan fakta dan hanya pada bidang dimana terdapat fakta. Termasuk dalam kategori ini adalah guru, petugas sosial, dosen, dokter, ahli hukum, dan sebagainya yang mencapai dan memelihara pengaruhnya karena mereka mempunyai pengetahuan untuk diberikkan kepada orang lain

e. Pemimpin diskusi

Tipe pemimpin yang seperti ini dapat dijumpai dalam lingkungan kepemimpinan yang demokratis dimana komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Seseorang yang secara lengkap memenuhi kriteria kepemimpinan demokratis ialah orang yang menerima peranannya sebagai pemimpin diskusi.

3. Tipe Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin akan mempengaruhi organisasi yang dipimpinya. Dedi (2012) menyebutkan tipe-tipe kepemimpinan adalah:¹⁰

a. Tipe Otokratik

Dilihat dari persepsinya seorang pemimpin yang otokratik adalah seorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan sikap yang menonjol "keakuannya".

b. Tipe Paternalistik

Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat dilingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya dimasyarakat agraris. Salah satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini kebabakan, sebagai tauladan atau panutan masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh adat, para

¹⁰ Ibid 9

ulama dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan.

c. Tipe Kharismatik

Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang kharismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang kharisnatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidk selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi.

d. Tipe Laissez Faire

Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri ari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi.

e. Tipe Demokratis

Pemimpin yang demokratis biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Menyadari bahwa mau tidak mau organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilakukan demi tercapainya tujuan. Melihat kecenderungan adanya pembagian peranan sesuai dengan tingkatnya. Memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi dan menjunjung harkat dan martabat manusia.

4. Karakter Kepemimpinan



Muhammad Ryaas Rasyid (2000) mengemukakan bahwa terdapat karakter kepemimpinan politik dan pemerintahan dunia, yaitu:¹¹

- a. Kepemimpinan yang sensitif, ditandai oleh kemampuan untuk secara dini memahami dinamika perkembangan masyarakat, mengerti apa yang mereka butuhkan, mengusahakan agar menjadi pihak pertama yang memberi perhatian terhadap kebutuhan itu. Pemimpin yang sensitif adalah mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang adanya kepedulian pemerintah atas kebutuhan.
- b. Kepemimpinan yang responsif, lahir berhadapan dengan masyarakat yang cenderung lebih aktif, pemimpin lebih banyak berperan menjawab aspirasi dan tuntutan masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media komunikasi. Kepemimpinan pemerintahan yang responsif banyak ditemui pada pemerintahan yang demokratis.
- c. Kepemimpinan yang defensif, ditandai dengan sifat egoistik, merasa paling benar. Kepemimpinan defensif melekat pada keberadaan seseorang yang pintar atau merasa paling pintar.
- d. Kepemimpinan yang represif, cenderung sama egois dan arogannya dengan karakter yang defensif, memonopoli kebenaran, kekuasaan identik dengan kebenaran, mudah curiga dan cemburu terhadap setiap orang atau kelompok.

B.3. Pembangunan masyarakat pedesaan

1. Pengertian pembangunan masyarakat pedesaan

Joni Ramat mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan), dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembangunan masyarakat desa mempunyai sifat integralistik yang berarti kegiatan pembangunan masyarakat desa meliputi seluruh kehidupan

¹¹ Muhammad Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan*, (Jakarta, PT.Mutiara Sumber Widya, 2000)

masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa merupakan wadah resmi dari seluruh aktivitas pembangunan yang menyangkut desa dan masyarakat desa¹²

Ali Hanapiah (2012) mengemukakan tentang pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.¹³

2.. Tujuan pembangunan masyarakat pedesaan

Setiap pembangunan pedesaan, mempunyai tujuan. Tujuan perlu dirumuskan terlebih dahulu karena sebagai arah, pedoman, acuan, monitoring dan evaluasi terhadap semua aktivitas pembangunan pedesaan. Bintarto (1983) menyatakan bahwa tujuan pembangunan masyarakat desa adalah:¹⁴

- a. Memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa sehingga warga desa tidak merasa jemu dengan lingkungan hidupnya
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga desa sehingga dapat menahan arus urbanisasi

¹² Joni Rahmat Pramudia, *Pembangunan Masyarakat*, [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/197106141998031-JONI RAHMAT PRAMUDIA/Pembangunan Masyarakat-HO.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/197106141998031-JONI_RAHMAT_PRAMUDIA/Pembangunan_Masyarakat-HO.pdf)

¹³ Ali Hanapiah, *Fenomena Pembangunan Desa*, (Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2011).

¹⁴ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983)

- c. Meningkatkan bidang pendidikan secara merata sehingga dapat mengurangi arus pelajar ke kota dan tenaga terdidik akan tetap tinggal di desa membimbing warga desa yang belum maju
- d. Modernisasi di bidang pengangkutan akan secara berangsur menghilangkan sifat isolasi desa
- e. Modernisasi merupakan tumpuan bagi pengembangan teknologi pedesaan dan proses pengembangannya masyarakat desa dapat diikuti sertakan.

B.4. *Political will* Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan

Political will merupakan kemauan politik atau harapan politik sebagai suatu tindakan dalam kegiatan yang melibatkan publik, masyarakat, baik dalam suatu organisasi masa maupun politik bertumpu kepada etika yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai suatu tujuan.

Political will melibatkan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang akan melakukan hak pilihnya untuk memilih figur kepemimpinan calon kepala desa melakukan sinergi dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Ali Hanapiyah (2012) menyatakan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang harus diperhatikan adalah harus bertolak dari kondisi *existing* desa tersebut. Esensi dari pembangunan desa adalah “bagaimana desa dapat membangun/ memanfaatkan/ mengeksplorasi dengan tepat (optimal, efektif dan efisien) segala potensi dan sumber daya yang dimiliki desa untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

15

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Suharsimi Arikunto (2002) berpendapat bahwa pada umumnya

¹⁵ Ibid 13

penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesa, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti mendidkripsikan data dengan kata-kata, kalimat dan mengurai bukan dengan angka. Moleong (2008) menyatakan bahwa penelitian mengedepankan data dengan berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh responden dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹⁷

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki hak pilih berjumlah 1500 orang. Sampel penelitian adalah 15% dari populasi yaitu 100 hak pilih. Suharsimi Arikunto (2002) mengemukakan di dalam pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100 diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10% – 15% atau 20% – 25% atau lebih.¹⁸

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Borg (1983) menyatakan bahwa angket perlu diujicobakan untuk melihat pernyataan, pengungkapan kata-kata yang meragukana bagi responden.¹⁹

4. Analisis data

Analisa data dengan menggunakan prosentase (persentil). Gay (1990) menegaskan bahwa analisis jawaban responden terhadap angket dapat dilakukan dengan menghitung persentase masing-masing pilihan yang tersedia pada setiap butir angket.²⁰

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002)

¹⁷ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 2008)

¹⁸ Ibid 15

¹⁹ Borg, Walter R., Gall, Meredith D, *Educational Research: An Introduction* (4th ed.), (New York, Langman Inc., 1983)

²⁰ Gay, L.R., *Educational Research: Competencies for Analysis and Application* (3rd ed), (New York, Macmillan Publishing Company, 1990)

D. Temuan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menemukan sebagaimana pada Tabel 1 menggambarkan sebagian besar responden (98%) menyatakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa berinisiatif dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Selainnya, adalah sebagian kecil responden (2%) tidak mempunyai inisiatif bagi kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

Tabel 1
Political will pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa

Alternatif jawaban	f	%
1. Mempunyai inisiatif	98	98,0
2. Tidak mempunyai inisiatif	2	2,0
Jumlah	100	100,0

Table 2 di bawah ini, menunjukkan hasil temuan penelitian bahwa *political will* pemilih figur calon kepala desa dalam melakukan tugas kepemimpinannya pada umumnya responden (82%) menyatakan adanya prioritas. Sedangkan sedikit responden (12%) menyatakan tidak ada ada prioritas

Tabel 2
Political will pemilih figur calon kepala desa dalam melakukan tugas kepemimpinannya

Alternatif jawaban	f	%
1. adanya prioritas	82	82,2
2. tidak ada prioritas	12	12,2
Jumlah	100	100,0

Mobilisasi dukungan politik seperti dinyatakan pada Table 3 sebanyak 30% responden, untuk mobilisasi pembangunan masyarakat lebih banyak responden (50%) dibanding keduanya, dan tidak banyak responden (20%) *political will*

pemilih figur calon kepala desa dalam melakukan tugas kepemimpinannya berorientasi kepada mobilisasi pembangunan pemerintahan desa.

Tabel 3

Political will pemilih figur calon kepala desa dalam melakukan tugas kepemimpinannya berorientasi

Alternatif jawaban	f	%
1. mobilisasi dukungan politik	30	30,0
2. mobilisasi pembangunan masyarakat	50	50,0
3. mobilisasi pembangunan pemerintahan desa	20	20,0
Jumlah	100	100,0

Penegakan hukum berupa hukuman yang berat bagi koruptor berjumlah 40% dan baik tidak ada hukuman yang berat bagi koruptor dan melaporkan kepada penegak hukum berjumlah sama masing-masing 21%, serta 18% *political will* pemilih figur calon kepala desa dalam menjalankan kepemimpinan menekankan kepada tidak mengambil sikap.

Tabel 4

Political will pemilih figur calon kepala desa dalam menjalankan kepemimpinan menekankan kepada

Alternatif jawaban	f	%
1. penegakan hukum berupa hukuman yang berat bagi koruptor	40	40,0
2. tidak ada hukuman yang berat bagi koruptor	21	21,0
3. melaporkan kepada penegak hukum	18	18,0
4. tidak mengambil sikap		
Jumlah	100	100,0

Hampir semua responden (99%) menyatakan bahwa *political will* pemilih figur calon kepala desa dalam menjalankan kepemimpinan berwawasan keberlanjutan usaha, dan hampir tidak ada responden (1%) menyatakan bahwa *political will*

pemilih figur calon kepala desa dalam menjalankan kepemimpinan berwawasan tidak melanjutkan usaha.

Tabel 5

Political will pemilih figur calon kepala desa dalam menjalankan kepemimpinan berwawasan

Alternatif jawaban	F	%
1. keberlanjutan usaha	99	99,0
2. tidak melanjutkan usaha	1	1,0
Jumlah	100	100,0

Responden (97%) menyatakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan memperhatikan dengan memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa, hanya 3% responden kurang memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa, sedangkan responden lainnya masing-masing 0% atau tidak ada yang menyatakan tidak dan sama sekali tidak memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa.

Tabel 6

Political will pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan memperhatikan dengan

Alternatif jawaban	F	%
1. memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa	97	97,0
2. kurang memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa	3	3,0
3. tidak memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa	0	0,0

4. sama sekali tidak memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa	0	0,0
Jumlah	100	100,0

Tidak ada responden (0%) yang menyatakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan tidak berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, jadi semua responden (100%) menyatakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi

Tabel 7

Political will pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan

Alternatif jawaban	F	%
1. meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi	100	100,0
2. tidak berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi	0	0,0
Jumlah	100	100,0

Political will pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan berdampak meningkatkan bidang pendidikan diungkapkan oleh sebagian besar responden (84%) dan responden lainnya (16%) mengungkapkan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan tidak berdampak pada peningkatan bidang pendidikan.

Tabel 8

Political will pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan berdampak

Alternatif jawaban	F	%
1. meningkatkan bidang pendidikan	84	84,0
2. tidak berdampak pada peningkatan bidang pendidikan	16	16,00
Jumlah	100	100,0

Semua responden (100%) menghendaki bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan melakukan modernisasi di bidang pengangkutan dan teknologi.

Tabel 9

Political will pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan

Alternatif jawaban	f	%
1. melakukan modernisasi di bidang pengangkutan dan teknologi	100	100,0
2. tidak melakukan modernisasi di bidang pengangkutan dan teknologi	0	0,0
Jumlah	100	100,0

Separo lebih responden (69%) mengemukakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan tidak mempersoalkan gender figur calon kepala desa, dan kurang dari separeo responden (31%) mengemukakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan mempersoalkan gender figur calon kepala desa.

Tabel 10

Political will pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan

Alternatif jawaban	f	%
--------------------	---	---

1. tidak mempersoalkan gender figur calon kepala desa	69	69,0
2. mempersoalkan gender figur calon kepala desa	31	31,0
Jumlah	100	100,0

Hampir seluruh responden (94%) berpendapat bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan adanya perubahan, sedangkan responden lainnya (6%) sangat sedikit berpendapat bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan tetap.

Tabel 11

Political will pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan

Alternatif jawaban	f	%
1. Adanya Perubahan	94	94,0
2. Tetap	6	6,0
Jumlah	100	100,0

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Bahwasanya sebagian besar responden (98%) menyatakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa berinisiatif dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Selainnya, adalah sebagian kecil responden (2%) tidak mempunyai inisiatif bagi kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

Political will pemilih figur calon kepala desa dalam melakukan tugas kepemimpinannya pada umumnya responden (82%) menyatakan adanya prioritas. Sedangkan sedikit responden (12%) menyatakan tidak ada ada prioritas.

Mobilisasi dukungan politik sebanyak 30% responden, untuk mobilisasi pembangunan masyarakat lebih banyak responden (50%) dibanding keduanya, dan tidak banyak responden (20%) *political will* pemilih figur calon kepala desa dalam melakukan tugas kepemimpinannya berorientasi kepada mobilisasi pembangunan pemerintahan desa.

Penegakan hukum berupa hukuman yang berat bagi koruptor berjumlah 40% dan baik tidak ada hukuman yang berat bagi koruptor dan melaporkan kepada penegak hukum berjumlah sama masing-masing 21%, serta 18% *political will* pemilih figur calon kepala desa dalam menjalankan kepemimpinan menekankan kepada tidak mengambil sikap.

Hampir semua responden (99%) menyatakan bahwa *political will* pemilih figur calon kepala desa dalam menjalankan kepemimpinan berwawasan keberlanjutan usaha, dan hampir tidak ada responden (1%) menyatakan bahwa *political will* pemilih figur calon kepala desa dalam menjalankan kepemimpinan berwawasan tidak melanjutkan usaha.

Responden (97%) menyatakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan memperhatikan dengan memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa, hanya 3% responden kurang memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa, sedangkan responden lainnya masing-masing 0% atau tidak ada yang menyatakan tidak dan sama sekali tidak memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monoton dari kehidupan desa.

Tidak ada responden (0%) yang menyatakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan tidak berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, jadi semua responden (100%) menyatakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

Political will pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan berdampak meningkatkan bidang pendidikan diungkapkan oleh sebagian besar responden (84%) dan responden lainnya

(16%) mengungkapkan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan tidak berdampak pada peningkatan bidang pendidikan.

Semua responden (100%) menghendaki bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan melakukan modernisasi di bidang pengangkutan dan teknologi.

Seperti lebih responden (69%) mengemukakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan tidak mempersoalkan gender figur calon kepala desa, dan kurang dari separo responden (31%) mengemukakan bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan mempersoalkan gender figur calon kepala desa.

Hampir seluruh responden (94%) berpendapat bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan adanya perubahan, sedangkan responden lainnya (6%) sangat sedikit berpendapat bahwa *political will* pemilih figur kepemimpinan calon kepala desa dalam pembangunan pedesaan tetap.

2. Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil temuan penelitian sebagaimana dalam kesimpulan tersebut, maka diberikan rekomendasi kepada:

- a. Figur kepemimpinan calon kepala desa memikirkan tentang *political will* pemilih untuk pembangunan masyarakat pedesaan.
- b. Kepala desa sebagai pemimpin terpilih seyogyanya memperhatikan *political will* pemilih dalam pembangunan masyarakat pedesaan.
- c. Keduanya baik kepala desa pemimpin terpilih maupun pemilih sinergi melakukan program pembangunan masyarakat pedesaan bertumpu nilai-nilai luhur menuju masyarakat makmur, berasas pancasila, dan taat menjalankan agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hanapiah. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Borg, Walter R., Gall, Meredith D. 1983. *Educational Research: An Introduction* (4th ed.) New York: Langman Inc.
- Craig Charney. 2009. *Political Will: What is it? How is it Measured?*. New York: Charney Research.
- Dedi. 2012. *Kepemimpinan*. Universitas Bina Dharma. <http://blog.binadarma.ac.id/dedi1968/wpcontent/uploads/2012/09/kepemimpinan.pdf>
- Derick W. Brinkerhoff. 1999. *State-Civil Society Networks For Policy Implementation In Developing Countries*. Review of Policy Research. Volume 16, Issue 1, pages 123–147, March 1999.
- Gay, L.R. 1990. *Educational Research: Competencies for Analysis and Application* (3rd ed). New York: Macmillan Publishing Company.
- Jacobs, T. O., and E. Jaques. 1990. Military executive leadership. In K.E. Clark and M. B. Clark, *Measures of Leadership*. West Orange, NJ: Leadership Library of America, Inc.
- Joni Rahmat Pramudia. *Pembangunan Masyarakat*. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/197106141998031-
JONI RAHMAT PRAMUDIA/Pembangunan Masyarakat-HO.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.%20PEND.%20LUAR%20SEKOLAH/197106141998031-JONI%20RAHMAT%20PRAMUDIA/Pembangunan%20Masyarakat-HO.pdf)
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat* Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Moeljarjo Tjokrowinoto. 1977. *Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan Administrasi di dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Buletin No.3/1977. Yogyakarta: BPA, UGM.
- Mochammad Teguh. 2001. *Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Dasar (LKIDI)*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Ryaas Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Nadyafirdhani. 2012. *National Power*. Surabaya: Unair. http://nadyafirdhani-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-61768-Umum-National%20Power.html

Stoner, Freeman, dan Gilbert.1995. *Management*. US: Prentice Hall.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

